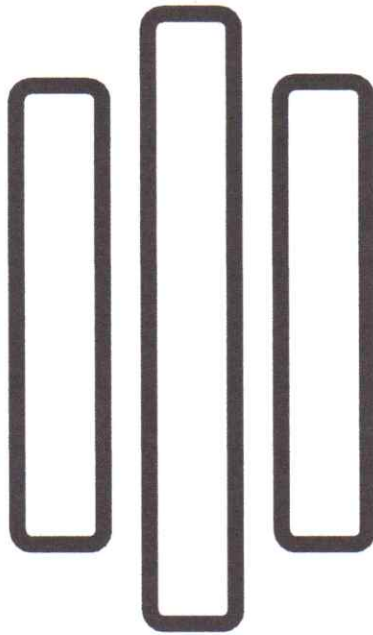




RENCANA KERJA OPD TAHUN 2025



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan ini dapat kami susun, meskipun masih terdapat kekurangannya.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 01 Tahun 2022 serta Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76) dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.

Rencana Kerja ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan/pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sekretariat Badan, masing-masing Bidang, Sub Bagian dan Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah yang ada di Kecamatan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Rencana Kerja ini sudah mengalami perubahan karena pada akhir bulan September 2024 ada penyesuaian sumber dana pada saat pembahasan APBD 2025 untuk Renja Tahun Anggaran 2025.

Akhirnya atas segala partisipasi dan kerjasama dari semua pihak sehingga tersusunnya Rencana Kerja ini, diucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi semua.

Kasongan, Oktober 2024
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Katingan,



TOTO JAYA, S.Pi
Pembina Tingkat I
NIP. 19720929 200604 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Bab I	Pendahuluan	1
A.	Latar Belakang	1
1.	Strategi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	1
2.	Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	1
3.	Gambaran dan Kondisi Terkini Sumber daya Manusia pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	2
4.	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	12
B.	Landasan Hukum	14
C.	Maksud dan tujuan	14
D.	Sistematika penulisan	15
Bab II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	16
A.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	16
B.	Analisis Kinerja Pelayanan OPD	25
C.	Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	31
D.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	34
Bab III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	42
A.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	42
B.	Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	42
Bab IV	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	44
A.	Program dan Kegiatan	44
B.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	53
Bab V	Penutup	86

DAFTAR TABEL

No.	Keterangan	Halaman
1	Tabel 1.1 Daftar Aparatur Sipil Negara	2
2	Tabel 1.2 Daftar Pegawai Harian Lepas	8
3	Tabel 1.3 Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan	9
4	Tabel 1.4 Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan dan Ruang	10
5	Tabel 1.5 Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan	11
6	Tabel 1.6 Daftar Pegawai Harian Lepas Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan	12
7	Tabel 2.1 Program, Kegiatan, Sasaran, dan Realisasi Anggaran	19
8	Tabel 2.2 Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
9	Tabel 2.3 Sasaran I Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan	26
10	Tabel 2.4 Sasaran II Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	27
11	Tabel 2.5 Sasaran III Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	29
12	Tabel 2.6 Sasaran IV Peningkatan Efektifitas Penganggaran Daerah	30
13	Tabel 2.7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	35
14	Tabel 4.1 Program/Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah	44
15	Tabel 4.2 Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah	48
16	Tabel 4.3 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab melalui pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan tulang punggung dalam perencanaan pembangunan daerah yang harus dioptimalkan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Katingan.

1. Strategi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

Strategi yang dijalankan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan kapasitas kelembagaan.
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penatausahaan dan Sistem Pelaporan Keuangan.
- c. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah secara tertib, transparandan akuntabel.
- d. Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Anggaran

2. Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

Sedangkan kebijakan yang ditempuh oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan yaitu :

- a. Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Aparatur.
- b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
- c. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Peningkatkan Pengelolaan Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Barang Milik Daerah.
- e. Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Anggaran

3. Gambaran dan Kondisi Terkini Sumber Daya Manusia pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan memiliki 51 orang ASN dan 25 orang Pegawai Harian Lepas.

Berkaitan dengan sumber daya manusia tersebut, maka berikut ini tercantum data Pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan :

Tabel 1.1
Daftar Aparatur Sipil Negara (ASN)
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

NO.	NAMA / NIP	JABATAN
1	TOTO JAYA, S.Pi 19720229 200604 1 008	Pembina Tingkat I (IV/a) Kepala Badan
2	MARJUNI, S.IP 19710124 199703 1 006	Pembina (IV/a) Sekretaris Badan
3	SIREN,SE.,M.A.P 19690917 199103 1 009	Pembina (IV/a) Kabid Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah
4	SUPRIADI, SE 19820602 201001 1 011	Penata Tingkat I (III/d) Kabid. Perencanaan Anggaran Daerah
5	PRIHATIN, S.Sos 19710201 199303 2 005	Penata Tingkat I (III/d) Kabid. Perbendaharaan Daerah

NO.	NAMA / NIP	JABATAN
6	MARTINA HERMIN, SE 19830325 200804 2 001	Pembina (IV/a) Kabid. Pengelolaan Barang Milik Daerah
7	BOY LIS JONIGER, SE.,M.Acc,Ak 19780623 200501 1 011	Pembina (IV/a) Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
8	MEISA ANITA, SE.,M.Si 19790501 200904 2 001	Pembina (IV/a) Kasubid. Penyusunan Anggaran
9	RITA SRIWULAN, SE 19820420 200804 2 008	Penata Tingkat I (III/d) Kasubid. Belanja Operasi
10	ADE PANTARUAN, S.Kom 19830217 200904 1 001	Penata Tingkat I (III/d) Kasubag. Umum dan Kepegawaian
11	GANDI YUDATAMA,S.Kom 19860825 201001 1 001	Penata Tingkat I (III/d) Kasubid Akuntansi Perangkat Daerah
12	ASNAWATI,SE 19820416 201101 2 002	Penata Tingkat I (III/d) Kasubag. Keuangan dan Pelaporan
13	SETYO WAHONO ABRORI, SE 19831220 201001 1 005	Penata Tingkat I (III/d) Kasubid Konsolidasi dan Pelaporan
14	HEPPY PRASETIYO,SE 19780127 200501 1 009	Penata Tingkat I (III/d) Kasubid. Pelaporan, Evaluasi & Pengendalian Anggaran
15	SEAN ELISABETH, SE 19771014 200501 2 010	Penata Tingkat I (III/d) Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

NO.	NAMA / NIP	JABATAN
16	AGUNG ASA BUANA, SE 19920415 201402 1 002	Penata Tingkat I (III/d) Kasubid.Analis Kebutuhan & Pemanfaatan BMD
17	LIPENG DAVID SAPUTRA, SE 19901102 201402 1 002	Penata (III/c) Kasubid.Pemindahtanganan,Pemusnahan& Penghapusan BMD
18	ELISTINA, SE 19820930 200701 2 003	Penata (III/c) Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
19	TAUPATZ GUNADI,A.Md 19821225 200904 1 001	Penata (III/c) Kasubid. Belanja Modal & Belanja Tak Terduga
20	DIAN RETNO PERTIWI, SE 19920323 201503 2 011	Penata (III/c) Pemeriksa Anggaran
21	ERWINA, SE 19780228 201101 2 002	Penata (III/c) Verifikator Keuangan
22	LUSTIANTI NOVIRA, A.Md 19751109 201001 2 002	Penata Muda Tingkat I (III/b) Pemeriksa Laporan & Transaksi Keuangan
23	ANTONIUS, SE 19790708 201001 1 005	Penata Muda Tingkat I (III/b) Pranata Komputer
24	EVA KUMALA SARI, A.Md 19881007 201001 2 001	Penata Muda Tingkat I (III/b) Verifikator Keuangan
25	NINA ROSIANA, SE 19770729 201001 2 005	Penata Muda Tingkat I (III/b) Pengadministrasi Umum

NO.	NAMA / NIP	JABATAN
26	FI'IBADI.,A.Md 19860906 201001 1 001	Penata Muda Tingkat I (III/b) Pengadministrasi Umum
27	ARBIDIN, SE 19731002 200801 1 010	Penata Muda Tingkat I (III/b) Analisis Perbendaharaan
28	YUTIARTI.,A.Md 19810427 201001 2 001	Penata Muda (III/a) Verifikator Keuangan
29	FAHMI SUBHAN 19800302 200701 1 008	Penata Muda (III/a) Pengelola Barang Milik Daerah
30	SRI WAHYUDI 19781013 200701 1 005	Penata Muda (III/a) Pengadministrasi Umum
31	BOB CANDRA HARIADI, SE 19840523 200701 1 003	Penata Muda (III/a) Pengadministrasi Umum
32	YAHYA TARUNA JAYA,A.Md.Farm 19911217 201402 1 002	Penata Muda (III/a) Pengadministrasi Umum
33	AILAN 19781123 200801 2 012	Penata Muda (III/a) Tenaga Administrasi
34	AINUN JARAH MUSRANI 19831123 200801 2 012	Penata Muda (III/a) Tenaga Administrasi
35	ABED SAUDI 19790406 200701 1 009	Pengatur (II/d) Pengadministrasi Umum

NO.	NAMA / NIP	JABATAN
36	MINARNI YANTI 19770520 201406 2 007	Pengatur (II/c) Pengadministrasi Umum
37	KERIE, S.Sos 19900825 202421 2 006	IX Arsiparis Ahli Pertama
38	NATURA JAYA, SE 19860227 202421 1 005	IX Arsiparis Ahli Pertama
39	MARLINDA,S.Kom 19860909 202421 2 006	IX Pranata Komputer Ahli Pertama
40	SILVINA APRIYATI,S.Kom 19900418 202421 2 005	IX Arsiparis Ahli Pertama
41	EFRILIANE EDY, S.Kom 19870817 202421 2 001	IX Perencana Ahli Pertama
42	ONNE, ST 19821030 202421 2 002	IX Perencana Ahli Pertama
43	KHOIRUL ANWAR, SE 19941009 202421 1 005	IX Perencana Ahli Pertama
44	FRAIDIYAH SARI MAYA, SE 19760430 202421 2 002	IX Arsiparis Ahli Pertama
45	HERMAN YUSMIFA ,S.Sos 19831130 202421 1 001	IX Arsiparis Ahli Pertama

NO.	NAMA / NIP	JABATAN
46	ERNITA MANIK, S.IP 19891015 202421 2 008	IX Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
47	ANGGELO PENLI, S.AN 19911220 202421 1 004	IX Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
48	BIO OKKLIANDO, S.Kom 19951019 202421 1 004	IX Pranata Komputer Ahli Pertama
49	RINI EFRIANA, S.Sos 19880302 202421 2 005	IX Arsiparis Ahli Pertama
50	FEDRIK, S.Sos 19981204 202421 2 005	IX Arsiparis Ahli Pertama
51	HERUTSETIANTY, SE 19810907 202421 2 003	IX Perencana Ahli Pertama

Tabel 1.2
Daftar Pegawai Harian Lepas (PHL)
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

NO.	NAMA / NIP	JABATAN
1	AGUSTRI SINTYA, SE	Pegawai Harian Lepas
2	ASTRI ANGHELIA	Pegawai Harian Lepas
3	ARPRIATY KRISTIN, SE	Pegawai Harian Lepas
4	CANGLIE	Pegawai Harian Lepas
5	DWI ARIANTI, SE	Pegawai Harian Lepas
6	FENI, SE	Pegawai Harian Lepas
7	HENDI SOSANTO WIJOYO, SE	Pegawai Harian Lepas
8	HEYDI SADUBLIN, S.Hut	Pegawai Harian Lepas
9	IKE ISTIANI, S.Pd	Pegawai Harian Lepas
10	KORNELIUS ENOE	Pegawai Harian Lepas
11	MUHARDIMANSYAH	Pegawai Harian Lepas
12	PEBRY AGUSTHEN, S.Sos	Pegawai Harian Lepas
13	RONI WIJAYA	Pegawai Harian Lepas
14	RUMI URINI, SE	Pegawai Harian Lepas
15	RUSTIANAE, SP	Pegawai Harian Lepas
16	SAPTA JAYA	Pegawai Harian Lepas
17	SURIYADI	Pegawai Harian Lepas
18	SURYADI, ST	Pegawai Harian Lepas

NO.	NAMA / NIP	JABATAN
19	SRIANI	Pegawai Harian Lepas
20	TAUFIK ADE KUSLA, SH	Pegawai Harian Lepas
21	TEDDY NOVIYANSON, SE	Pegawai Harian Lepas
22	WINDA, S.M	Pegawai Harian Lepas
23	WIRNAE	Pegawai Harian Lepas
24	ZAINUDIN	Pegawai Harian Lepas
25	ZWAGERI, S. Pi	Pegawai Harian Lepas

Klasifikasi Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan :

Tabel 1.3

**Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan**

Jumlah Dalam Satuan Orang

Tingkat Pendidikan		Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-
3	SMA	-	2	4	-	6
4	D - 1	-	-	-	-	-
5	D - 2	-	-	-	-	-
6	D - 3	-	-	6	-	6
7	D - 4	-	-	-	-	-

Tingkat Pendidikan		Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
8	S - 1	-	-	18	3	21
9	S - 2	-	-	-	3	3
10	S - 3	-	-	-	-	-
Jumlah		-	2	28	6	36

Klasifikasi Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan berdasarkan golongan dan ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan dan Ruang
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan
 Jumlah Dalam Satuan Orang

No.	Golongan / Ruang	Jumlah	Keterangan
1.	IV / c	0	
	IV / b	1	
	IV/a	5	
	Jumlah Golongan IV	6	
2.	III/d	10	
	III/c	5	
	III/b	6	
	III/a	7	
	Jumlah Golongan III	28	
3.	II /d	1	
	II/c	1	
	II/b	0	
	II/a	0	

No.	Golongan / Ruang	Jumlah	Keterangan
	Jumlah Golongan II	2	
	Total Gol II + III + IV	36	

Klasifikasi Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan berdasarkan pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

Jumlah Dalam Satuan Orang

No.	Tingkat Pendidikan Penjenjangan	Jumlah	Keterangan
1.	Diklatpim II	1	
2.	Diklatpim III	5	
3.	Diklatpim IV	3	
TOTAL		9	

Klasifikasi Pegawai Harian Lepas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6

**Daftar Pegawai Harian Lepas
Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan**

Jumlah Dalam Satuan Orang

Tingkat Pendidikan		Jumlah
1	SD	0
2	SMP	0
3	SMA	6
4	D - 1	0
5	D - 2	0
6	D - 3	6
7	D - 4	0
8	S - 1	21
9	S - 2	3
Jumlah		36

4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kedudukan

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan tahun 2025 adalah rencana tahunan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan Dinas yang berfungsi sebagai Perencanaan Taktis yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada rencana strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 – 2026 serta kedudukan, tugas pokok Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan di pengelolaan keuangan dan aset daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok adalah melaksanakan kewenangan bidang fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.
2. Fungsi adalah :
 - a) Penyusunan kebijakan teknis Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaantugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan.

B. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja SKPD untuk menjabarkan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Proses dan sistematika penyusunan konsep dasar Rancangan Rencana

Kerja :

- Bab I Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - 1. Strategi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan
 - 2. Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan
 - 3. Gambaran dan Kondisi Terkini Sumber Daya Manusia pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan
 - 4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan tujuan
 - D. Sistematika penulisan
- Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
 - C. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
 - D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - B. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- Bab IV Program dan Kegiatan
 - A. Program dan Kegiatan
 - B. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
- Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD tahun lalu. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan penjabaran perencanaan tahunan, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah dicapai selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024, untuk menyusun Rencana Kerja pada Tahun Anggaran 2025.

Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

1. Meningkatnya ...

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
3. Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan;
4. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dan Narasumber yang kompeten.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan bimbingan teknis.

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 untuk mendukung target capaian kinerja Badan dengan Pimpinan Daerah Kabupaten Katingan sehingga dokumen perencanaan disusun dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Badan yang dirumuskan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Namun demikian, target capaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sebagai bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset tidak berubah. Untuk itu dalam tahapan berikutnya diuraikan rangkaian pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

a. **Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja diikuti penetapan besaran indikator kinerja setiap jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. **Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan ditunjang dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 261.694.719.934,- yang dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 28.415.880.588,- Belanja Modal sebesar Rp. 7.353.490.422,- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.000.000.000,- Belanja Transfer sebesar Rp. 220.925.348.924,- Terhadap Belanja Belanja Operasi sebesar Rp. 28.415.880.588,- tersebut dapat direalisasikan penyerapannya sebesar Rp. 24.773.466.921,- atau 87.18%, Belanja Modal sebesar Rp. 7.314.925.644,- atau 99.48% Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 1.082.625.800,00 atau 21.65% dan Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp. 220.900.965.767,- atau 99.99%. Sehingga total penyerapan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 sebesar Rp. 254.071.984.132,- atau 97.09% atau **“Berhasil”**

Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sasaran, Realisasi Anggaran dan Sisa Anggaran yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023 seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.1

**Program, Kegiatan, Sasaran, dan Realisasi Anggaran
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran 2023**

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	Jumlah Paket	Realisasi		Fisik
				Keuangan	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Daerah	261,694,719,934	255	254,071,984,132	97.09	97.09
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19,547,962,189	132	17,545,806,098	89.76	89.76
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	296,743,764	11	265,289,100	89.40	89.40
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68,910,619	4	61,880,800	89.80	89.80
	- Belanja Operasi	68,910,619	4	61,880,800	89.80	89.80
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	145,971,890	4	131,903,600	90.36	90.36
	- Belanja Operasi	145,971,890	4	131,903,600	90.36	90.36
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81,861,255	3	71,504,700	87.35	87.35
	- Belanja Operasi	81,861,255	3	71,504,700	87.35	87.35
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,075,175,582	11	6,232,912,173	88.10	88.10
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,857,177,183	3	6,059,122,573	88.36	88.36
	- Belanja Operasi	6,857,177,183	3	6,059,122,573	88.36	88.36
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55,638,172	3	46,741,900	84.01	84.01
	- Belanja Operasi	55,638,172	3	46,741,900	84.01	84.01
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	162,360,227	5	46,741,900	78.25	78.25
	- Belanja Operasi	162,360,227	5	46,741,900	78.25	78.25
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	175,090,837	3	160,000,000	91.38	91.38
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175,090,837	3	160,000,000	91.38	91.38
	- Belanja Operasi	175,090,837	3	160,000,000	91.38	91.38
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,916,669,276	34	2,456,808,261	84.23	84.23
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	117,095,084	4	116,833,000	99.78	99.78
	- Belanja Operasi	101,756,904	3	101,495,000	99.74	99.74
	- Belanja Modal	15,338,180	1	15,338,000	100	100

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	988,998,159	14	980,218,425.00	99.11	99.11
- Belanja Operasi	323,329,729	6	315,712,625	97.64	97.64
- Belanja Modal	665,668,430	8	664,505,800	99.83	99.83
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33,160,344	4	32,814,268	98.96	98.96
- Belanja Operasi	7,685,863	3	7,683,424	99.97	99.97
- Belanja Modal	25,474,481	1	25,130,844	98.65	98.65
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	394,287,715	5	211,924,710	53.75	53.75
- Belanja Operasi	394,287,715	5	211,924,710	53.75	53.75
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	307,964,621	3	307,569,000	99.87	99.87
- Belanja Operasi	307,964,621	3	307,569,000	99.87	99.87
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	105,313,353	3	89,677,280	85.15	85.15
- Belanja Operasi	105,313,353	3	89,677,280	85.15	85.15
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	969,850,000	1	717,771,578	74.01	74.01
- Belanja Operasi	969,850,000	1	717,771,578	74.01	74.01
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6,530,654,452	35	6,510,116,000	99.69	99.69
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6,238,123,000	28	6,219,982,000	99.71	99.71
- Belanja Modal	6,238,123,000	28	6,219,982,000	99.71	99.71
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	292,531,452	7	290,134,000	99.18	99.18
- Belanja Operasi	28,862,052	4	28,650,000	99.27	99.27
- Belanja Modal	263,669,400	3	261,484,000	99.17	99.17
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,218,384,586	22	872,346,414	71.60	71.60
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32,605,000	3	144,000	0.44	0.44
- Belanja Operasi	32,605,000	3	144,000	0.44	0.44
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	447,085,000	5	327,995,914	73.36	73.36
- Belanja Operasi	447,085,000	5	327,995,914	73.36	73.36
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,744,100	7	69,052,500	68.54	68.54
- Belanja Operasi	100,744,100	7	69,052,500	68.54	68.54
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	637,950,486	7	475,154,000	74.48	74.48
- Belanja Operasi	637,950,486	7	475,154,000	74.48	74.48
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,335,243,692	16	1,048,334,150	78.51	78.51

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	758,292,696	7	481,033,850	63.44	63.44
- Belanja Operasi	758,292,696	7	481,033,850	63.44	63.44
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	576,950,996	9	567,300,300	98.33	98.33
- Belanja Operasi	576,950,996	9	567,300,300	98.33	98.33
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	240,910,041,538	92	235,434,840,387	97.73	97.73
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,541,279,104	28	1,386,884,478	89.98	89.98
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	102,802,968	4	94,401,732	91.83	91.83
- Belanja Operasi	102,802,968	4	94,401,732	91.83	91.83
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	53,524,968	2	52,744,244	98.54	98.54
- Belanja Operasi	53,524,968	2	52,744,244	98.54	98.54
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	0	0	0	0	0
- Belanja Operasi	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	349,532,844	6	311,738,774	89.19	89.19
- Belanja Operasi	346,202,844	5	308,408,774	89.08	89.08
- Belanja Modal	3,330,000	1	3,330,000	100	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	342,217,430	5	300,819,348	89.08	89.08
- Belanja Operasi	342,217,430	5	300,819,348	89.08	89.08
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	693,200,894	11	627,180,380	90.48	90.48
- Belanja Operasi	611,570,894	8	545,550,380	89.20	89.20
- Belanja Modal	81,630,000	3	81,630,000	100	100
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	999,261,585	23	971,719,608	97.24	97.24
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	417,028,392	4	397,515,548	95.32	95.32
- Belanja Operasi	417,028,392	4	397,515,548	95.32	95.32
Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	127,542,263	4	127,457,030	99.93	99.93
- Belanja Operasi	127,542,263	4	127,457,030	99.93	99.93

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	150,558,632	7	150,266,030	99.81	99.81
	- Belanja Operasi	150,558,632	7	150,266,030	99.81	99.81
	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	143,507,090	3	138,388,000	96.43	96.43
	- Belanja Operasi	143,507,090	3	138,388,000	96.43	96.43
	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	160,625,208	5	158,093,000	98.42	98.42
	- Belanja Operasi	160,625,208	5	158,093,000	98.42	98.42
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1,075,244,471	22	915,038,660	85.10	85.10
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	38,135,000	2	32,813,000	86.04	86.04
	- Belanja Operasi	38,135,000	2	32,813,000	86.04	86.04
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	405,670,992	7	302,503,840	74.57	74.57
	- Belanja Operasi	405,670,992	7	302,503,840	74.57	74.57
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	0	0	0	0	0
	- Belanja Operasi	0	0	0	0	0
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	263,973,825	6	251,397,264	95.24	95.24
	- Belanja Operasi	263,973,825	6	251,397,264	95.24	95.24
	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	94,807,392	2	57,540,740	60.69	60.69
	- Belanja Operasi	94,807,392	2	57,540,740	60.69	60.69
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	237,129,848,924	13	232,013,955,747	97.84	97.84
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	8,936,500,000	3	7,811,864,180	87.42	87.42
	- Belanja Operasi	8,936,500,000	3	7,811,864,180	87.42	87.42
	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	218,694,656,200	7	218,645,156,200	99.98	99.98

- Belanja Operasi	2,268,000,000	4	2,218,500,000	97.82	97.82
- Belanja Transfer	216,426,656,200	3	216,426,656,200	100.00	100.00
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5,000,000,000	1	1,082,625,800	21.65	21.65
- Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000	1	1,082,625,800	21.65	21.65
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	4,498,692,724	2	4,474,309,567	99.46	99.46
- Belanja Transfer	4,498,692,724	2	4,474,309,567	99.46	99.46
Kegiatan Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	164,407,454	6	147,241,894	89.56	89.56
Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	68,007,454	4	66,044,384	97.11	97.11
- Belanja Operasi	68,007,454	4	66,044,384	97.11	97.11
Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	96,400,000	2	81,197,510	84.23	84.23
- Belanja Operasi	96,400,000	2	81,197,510	84.23	84.23
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,236,716,207	31	1,091,337,647	88.24	88.24
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,236,716,207	31	1,091,337,647	88.24	88.24
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	240,218,105	7	189,703,648	78.97	78.97
- Belanja Operasi	230,618,105	6	189,703,648	82.26	82.26
- Belanja Modal	9,600,000	1	0	0	0
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	405,597,063	9	363,645,240	89.66	89.66
- Belanja Operasi	371,590,132	7	334,940,240	90.14	90.14
- Belanja Modal	34,006,931	2	28,705,000	84.41	84.41
Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	111,157,764	4	92,056,563	82.82	82.82
- Belanja Operasi	111,157,764	4	92,056,563	82.82	82.82
Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	377,078,160	7	355,603,196	94.30	94.30
- Belanja Operasi	360,428,160	6	340,783,196	94.55	94.55
- Belanja Modal	16,650,000	1	14,820,000	89.01	89.01
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	102,665,115	4	90,329,000	87.98	87.98
- Belanja Operasi	102,665,115	4	90,329,000	87.98	87.98

Dalam melaksanakan ...

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dana yang dibutuhkan adalah sebagian besar bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan (APBD Kabupaten). Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, maka hasil evaluasi terhadap capaian kinerja urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan pada tahun 2023 yaitu tersedianya Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2024 – 2026 dan Dokumen RKPD Tahun 2024.

Tabel 2.2

**Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran 2023**

No	I n d i k a t o r	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi Tahun 2024	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Reformasi Birokrasi BPKAD										Penilaian RB dilakukan tahun 2023
2	Nilai Evaluasi SAKIP BPKAD (predikat)			BB	B	B	BB	B	BB		
3	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP dan Tepat Waktu			100%	100%	100%	100%	90,85%	97,73%		
4	Persentase Penyampaian Laporan BMD yang sesuai ketentuan dan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	84,85%	89,06%		
5	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Anggaran			100%	100%	100%	100%	84,85%	89,06%		

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Hasil pengukuran dan analisis kinerja dilakukan sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 yaitu ***“Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel”***

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja yang meliputi indikator makro dan indikator mikro dimana penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Berdasarkan target, realisasi dan tingkat pencapaian sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan tahun 2023 di atas, dapat dijelaskan masing-masing capaian indikator sasaran beserta penjelasan analisisnya sebagaimana berikut :

Tabel 2.3
Sasaran I
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target Renstra (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan BKAD	Nilai Evaluasi SAKIP BKAD	Predikat	B	BB	BB
		Persentase Cakupan Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kesekretariatan	100	89,76	89,76

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan BKAD” adalah sebesar 89,76% yang berarti masuk dalam kategori capaian **“Cukup Berhasil”**.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 2.4

Sasaran II Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target Renstra (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP dan Tepat Waktu	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP dan Tepat Waktu	100	97,73	97,73

Berdasarkan ...
Page 27

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah” adalah sebesar 97,73% yang berarti masuk dalam kategori capaian **“Berhasil”**.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
4. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
5. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Propinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

Penyusunan ...

Page 28

5. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
6. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
2. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 2.5

Sasaran III Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Aset Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target Renstra (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Penyampaian Laporan BMD yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Penyampaian Laporan Pengelolaan BMD yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	89,06	89,06

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Aset Daerah” adalah 89,06% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Cukup Berhasil”

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Penyusunan Standar Harga
2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3. Inventarisasi Barang Milik Daerah
4. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Tabel 2.6
Sasaran IV
Peningkatan Efektifitas Penganggaran Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target Renstra (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Peningkatan Efektifitas Penganggaran Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Anggaran	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100	89,98	89,98

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian sasaran “Peningkatan Efektifitas Penganggaran Daerah” adalah sebesar 89,98% yang berarti masuk dalam kategori capaian **“Cukup Berhasil”**

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
6. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

C. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan program dan kegiatan karena dampaknya sangat signifikan di masa yang akan datang.

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan membawahi 1 (satu) bagian sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan dan pelaporan dan membawahi 4 (empat) bidang yaitu:

- a. Bidang perencanaan anggaran daerah, terdiri dari sub bidang penyusunan anggaran dan sub bidang pelaporan, evaluasi dan pengendalian anggaran
- b. Bidang perbendaharaan daerah, terdiri dari sub bidang belanja daerah (operasi) dan sub bidang belanja modal dan belanja tak terduga
- c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari sub bidang akuntansi perangkat daerah serta sub bidang konsolidasi dan pelaporan
- d. Bidang pengelolaan barang milik daerah, terdiri dari sub bidang analisa kebutuhan dan pemanfaatan barang milik daerah serta sub bidang pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

Selain itu ...

Selain itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah juga mempunyai kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis.

Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta perubahannya
- b. Organisasi dan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten
- c. Dana Transfer, Investasi dan Pinjaman Daerah :
 - Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU Kabupaten dan pelaporan pengelolaan DAU Kabupaten
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari pengelolaan DAK (bagi kabupaten yang menerima DAK) ; pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK
 - Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari penyiapan data realisasi penerima DBH Kabupaten; pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH
 - Penetapan, pelaksanaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan investasi dan aset daerah
 - Penetapan, pelaksanaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU Kabupaten
- d. Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri dari penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan desa; penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten dan APBD Desa serta fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB Desa.

Dalam melaksanakan...

Selain itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah juga mempunyai kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis.

Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta perubahannya
- b. Organisasi dan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten
- c. Dana Transfer, Investasi dan Pinjaman Daerah :
 - Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU Kabupaten dan pelaporan pengelolaan DAU Kabupaten
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari pengelolaan DAK (bagi kabupaten yang menerima DAK) ; pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK
 - Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari penyiapan data realisasi penerima DBH Kabupaten; pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH
 - Penetapan, pelaksanaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan investasi dan aset daerah
 - Penetapan, pelaksanaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU Kabupaten
- d. Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri dari penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan desa; penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten dan APBD Desa serta fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB Desa.

Dalam melaksanakan...

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan dan Aset Daerah
- f. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, kepala badan keuangan dan aset daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- b. Memimpin pelaksanaan pelayanan penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah
- c. Memimpin pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rancangan Perda tentang APBD dan Perda tentang perubahan APBD
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- f. Melaksanakan fungsi BUD
- g. Merumuskan dan menetapkan program kerja Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas jangka menengah dan jangka pendek

Menyusun ...

- h. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
- i. Mengesahkan DPA SKPD
- j. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
- k. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah
- l. Menetapkan SPD
- m. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah
- n. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- o. Menyajikan informasi keuangan daerah
- p. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- q. Merumuskan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah
- r. Memberikan saran dan pertimbangan dibidang tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Dokumen ...

Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD. Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, program kegiatan yang dilaksanakan sebagian mengalami perubahan terhadap rancangan awal RKPD yang dibahas dalam KUA dan PPAS Perubahan karena diantaranya mengalami pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan serta penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif.

Tabel 2.7
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
Program	Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	296.743,764	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.40	265,289,100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	68,910,619	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.80	61,880,800
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 dokumen	145,971,890	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	90.36	131,903,600
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	81,861,255	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.35	71,504,700
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan OPD	2 dokumen	7,075,175,582	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan OPD	88.10	6,232,912,173
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua kabupaten/ko	Jumlah Orang yang	14 bulan	6,857,177,183	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua kabupaten	Jumlah Orang yang menerima	88.36	6,059,122,573

		ta, semua kecamatan, semua kelurahan	menerima Gaji dan Tunjangan ASN				en/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Gaji dan Tunjangan ASN		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	55,638,172.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	84.01	46,741,900.
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	162,360,227	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	78.25	127,047,700
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti	8 kali	175,090,837	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti	91.38	160,000,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	175,090,837	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91.38	160,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	85%	2,916,669,276	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	84.23	2,456,808,261
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0	4 Paket	117,095,084	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0	99.11	116,833,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2	2 Paket	33,160,344	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2	98.96	32,814,268
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	6 Paket	394,287,715.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	53.75	211,924,710
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	4 Paket	105,313,353	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	85.15	89,677,280
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	2 dokumen	105,313,353	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	85.15	89,677,280

		kelurahan	undangan yang Disediakan				an, semua kelurahan	undangan yang Disediakan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	969,850,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.01	717,771,578
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang	85%	6,530,654,452	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang	99.69	6,510,116,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2	2 Paket	6,238,123,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2	28.00	6,219,982,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 unit	292,531,452	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	99.18	290,134,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Terpenuhinya Pelayanan Perkantoran	80%	1,218,384,586	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Terpenuhinya Pelayanan Perkantoran	71.60	872,346,414
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	447,085,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	73.36	327,995,914
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100,744,100	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	68.54	69,052,500
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	637,950,486	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	74.48	475,154,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang milik OPD	100%	1,335,243,692	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang milik OPD	78.51	1,048,334,150
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 unit	758,292,696	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63.44	481,033,850
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Dir	2 unit	576,950,996	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Dir	98.33	567,300,300

		kelurahan	ehabilitasi 2				an, semua keluraha n	abilitasi 2		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Semua kabupaten/ko ta, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penggangan	11 dokumen	1,541,279,104	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Semua kabupat en/kota, semua kecamatan, semua keluraha n	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penggangan	89.98	1,386,884,478
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Semua kabupaten/ko ta, semua kecamatan, semua kelurahan	n Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Disusun 2	2 dokumen	102,802,968.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Semua kabupat en/kota, semua kecamatan, semua keluraha n	n Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Disusun 2	91.83	94,401,732.00
	Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Semua kabupaten/ko ta, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah RKA- SKPD yang Di Verifikasi	38 dokumen	53,524,968	Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Semua kabupat en/kota, semua kecamatan, semua keluraha n	Jumlah RKA- SKPD yang Di Verifikasi	98.54	52,744,244
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Semua kabupaten/ko ta, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	349,532,844	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Semua kabupat en/kota, semua kecamatan, semua keluraha n	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	89.19	311,738,774
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Semua kabupaten/ko ta, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran perubahan APBD	2 dokumen	693,200,894	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Semua kabupat en/kota, semua kecamatan, semua keluraha n	Jumlah Peraturan daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran perubahan APBD	11.00	627,180,380
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Semua kabupaten/ko ta, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Perbendaharaan dan Kasda	5 dokumen	999,261,585	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Semua kabupat en/kota, semua kecamatan, semua keluraha n	Jumlah Dokumen Laporan Perbendaharaan dan Kasda	97.24	971,719,608
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Semua kabupaten/ko ta, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 dokumen	417,028,392	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Semua kabupat en/kota, semua kecamatan, semua keluraha n	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	95.32	397,515,548
	Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Semua kabupaten/ko ta, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	152 dokumen	127,542,263.00				99.93	127,457,030.00
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong an dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	Semua kabupaten/ko ta, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/P emotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga	53 Laporan	150,558,632	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	Semua kabupat en/kota, semua kecamatan, semua keluraha n	Jumlah Laporan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) dan Laporan Hasil Koordinasi	99.81	150,266,030

			(PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Pihak Ketiga (PFK)					Dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Pihak Ketiga (PFK)		
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Petunjuk Teknis administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	143,507,090	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Petunjuk Teknis administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	96.43	138,388,000
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 orang	160,625,208	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	98.42	158,093,000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah	8 dokumen	1,075,244,471	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah	85.10	915,038,660
	Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	12 dokumen	38,135,000	Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	86.04	32,813,000
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	12 Laporan	405,670,992	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	74.57	302,503,840
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	2 dokumen	272,657,262	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	99.31	270,783,816

	Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 dokumen	0.00	Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	0.00	0.00
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Kebijakan dan Panduan teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen	263,973,825.00	Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Kebijakan dan Panduan teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	95.24	251,397,264.00
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah orang Yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150 orang	94,807,392	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah orang Yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	60.69	57,540,740
	Pemungjung Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Bulan Pengelolaan Keuangan Daerah	12 bulan	237,129,848,924	Pemungjung Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Bulan Pengelolaan Keuangan Daerah	97.84	232,013,955,747
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi 1	1 laporan	8,936,500,000	Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi 1	87.42	7,811,864,180
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak	1 Laporan	218,694,656,200	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak	99.98	218,645,156,200
	Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	5,000,000,000	Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21.65	1,082,625,800
	Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 1	1 laporan	4,498,692,724	Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 1	99.46	4,474,309,567
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Cakupan Pengelolaan keuangan Daerah	100%	164,407,454	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Cakupan Pengelolaan keuangan Daerah	100%	89.56	147,241,894
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Sistem Informasi Keuangan	2 sistem	68,007,454	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Sistem Informasi Keuangan	97.11	66,044,384

	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah orang Yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	96,400,000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah orang Yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah pemerintah Kabupaten/Kota	84.23	81,197,510
PROGRAM										
PEGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Cakupan Pengelolaan Aset Daerah	100%	1,236,716,207	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Cakupan Pengelolaan Aset Daerah	88.24	1,091,337,647
	Penyusunan Standar Harga	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah standar Harga yang Disusun	38 dokumen	240,218,105	Penyusunan Standar Harga	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah standar Harga yang Disusun	78.97	189,703,648
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	38 dokumen	405,597,063	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	89.66	363,645,240
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 laporan	111,157,764	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	82.82	92,056,563
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15 dokumen	377,078,160	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	94.30	355,603,196
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Hasil rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	76 laporan	102,665,115	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Hasil rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	87.98	90,329,000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Beberapa kebijakan nasional dalam perencanaan pembangunan yang harus menjadi acuan pemerintah daerah termasuk SKPD di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.
2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
3. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan adalah :

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Adapun penyusunan Rencana Kerja ini adalah bertujuan :

1. Idealistik dalam arti bahwa tujuan adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan sesuatu serta keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih dan lebih berhasil;
2. Jangkauan ke depan dalam arti bahwa tujuan dapat dicapai dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan;
3. Abstrak dalam arti bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
4. Konsisten dalam arti bahwa tujuan harus dicapai secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan adalah :

- a. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan BKAD
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan aset daerah
- d. Peningkatan Efektifitas Penganggaran Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Data Rencana Kerja OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 melaksanakan 3 program dan 13 kegiatan, yaitu :

Tabel 4.1

**Program/Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran 2025**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5.02	KEUANGAN	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
5.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.02.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.02.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
5.02.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.02.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.02.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
5.02.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5.02.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
5.02.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.02.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.02.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.02.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.02.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.02.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
5.02.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5.02.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.02.01.2.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5.02.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.02.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.02.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.02.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5.02.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.02.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
5.02.02.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
5.02.02.02.01.01		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
5.02.02.02.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
5.02.02.02.01.03		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
5.02.02.02.01.07		Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
5.02.02.02.01.08		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
5.02.02.02.01.09		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
5.02.02.02.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
5.02.02.02.02.01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
5.02.02.02.02.03		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
5.02.02.02.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5.02.02.02.02.10		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
5.02.02.02.02.11		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

5.02.02.02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
5.02.02.02.03.02		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
5.02.02.02.03.03		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
5.02.02.02.03.05		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5.02.02.02.03.07		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
5.02.02.02.03.09		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
5.02.02.02.03.11		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.02.02.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
5.02.02.02.04.07		Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
5.02.02.02.04.08		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
5.02.02.02.04.09		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
5.02.02.02.04.10		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
5.02.02.02.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	

5.02.02.02.05.02		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
5.02.02.02.05.03		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
5.02.03.02.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
5.02.03.02.01.01		Penyusunan Standar Harga
5.02.03.02.01.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
5.02.03.02.01.06		Inventarisasi Barang Milik Daerah
5.02.03.02.01.10		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5.02.03.02.01.11		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Adapun anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2025

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	PENDANAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN KEUANGAN	
5.02	KEUANGAN	307,590,435,000
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20,266,167,692

5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	359,081,476
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89,516,999
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	145,075,738
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124,488,739
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,015,484,880
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,748,087,787
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	63,325,944
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	204,071,149
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	292,794,133
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	141,434,220
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	151,359,913
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,434,034,767
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	113,780,078
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,207,958,027
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29,230,648
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	496,703,573
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	359,628,879

5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	116,921,562
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,109,812,000
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,075,935,778
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3,074,935,778
5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,000,000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,804,946,318
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	59,296,050
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	593,439,961
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	215,164,136
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	807,636,734
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,283,890,340
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	860,788.700
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	268,620,737
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	287,086,599,190
5.02.02.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,552,401,542
5.02.02.02.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	122,360,000

5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	98,741,542
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	15,200,000
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	312,795,000
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	297,930,000
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	705,375,000
5.02.02.02.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1,583,240,000
5.02.02.02.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	664,581,150
5.02.02.02.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	212,805,438
5.02.02.02.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	67,274,728
5.02.02.02.02.07	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran KAS Daerah Laporan Aliran Kas dan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran perhitungan Fihak ke tiga	321,450,321
5.02.02.02.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	317,128,363
5.02.02.02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1,290,601,635
5.02.02.02.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja, Pembiayaan,Pendapatan-LO dan Beban	112,564,411

5.02.02.02.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	500,000,000
5.02.02.02.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	350,000,000
5.02.02.02.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	24,975,085
5.02.02.02.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	163,711,645
5.02.02.02.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	139,350,494
5.02.02.02.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	282,422,317,648
5.02.02.02.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	12,450,742,320
5.02.02.02.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	242,311,575,328
5.02.02.02.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20,160,000,000
5.02.02.02.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	7,500,000,000.
5.02.02.02.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	238,038,365
5.02.02.02.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	152,294,075
5.02.02.02.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	85,744,290

5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,518,080,000
5.02.03.02.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,518,080,000
5.02.03.02.01.01	Penyusunan Standar Harga	335,751,920
5.02.03.02.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	261,210,000
5.02.03.02.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	238,161,154
5.02.03.02.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	558,732,137
5.02.03.02.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	124,224,789

Lokasi kegiatan dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 adalah di Kabupaten Katingan dengan kebutuhan dana indikatif pada Renja 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan bersumber dari dana APBD Kabupaten Katingan sebesar **Rp. 307,590,435,000.00**

B. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sebagai bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset, tahun 2025 sebanyak 3 program dan 13 kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD senilai **Rp. 307.590.435.000,00**. Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, dimaksud disajikan sebagaimana tabel adalah sebagai berikut :

TABEL 4.3
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENUA OPD)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. KATINGAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN PERIODE RENSITRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENSITRA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENSITRA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					307.590.435.000,00								350.711.274.747,00	
	5	UN SUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					307.590.435.000,00								350.711.274.747,00	
	5.02	KEUANGAN					307.590.435.000,00								350.711.274.747,00	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Nilai LAKIP	B Predikat			18.986.277.352,00							B Predikat	36.295.252.146,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Keunggulan dan Evaluasi	8 Dokumen			359.081.476,00							8 Dokumen	359.479.022,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN REMA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET REMA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGKUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen				89.516.999,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6. Percepatan pemerataan Reformasi Birokrasi menuju pe merintahan yang bersih, akurabel dan kapabel	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	96.528.099,00	BADAN KEJANGSANDAN ASET DAERAH
5 02 012 01 0002																
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen				145.075.738,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PAJAK DAERAH		Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6. Percepatan pemerataan Reformasi Birokrasi menuju pe merintahan yang bersih, akurabel dan kapabel	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	161.013.311,00	BADAN KEJANGSANDAN ASET DAERAH
5 02 012 01 0007																
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRIBRA OPD	REALISASI CAPAIAN REKORD OPD TAHUN 2023	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET REKORD OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PENCAPAIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PEANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orangbukan				8.748.087.767,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	34 Orangbukan	10.503.560.913,00	BADAN KEJANGKARAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0005		Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan				1 Laporan	63.325.944,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	1 Laporan	74.054.407,00	BADAN KEJANGKARAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0007		Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD														

Activat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan			1 Laporan	204.071.149.00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	1 Laporan	222.360.754.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kompetensi sdm aparatur sesuai bidangnya	100 Persen ase			100 Persentase	292.794.133.00			-	Meningkatkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	100 Persen ase	242.600.504.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Alatnya															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGATAN / SUB KEGATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGATAN / SUB KEGATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTSTA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pelajar Dinas beserta Alimat / Ketrampilan	1 Paket				141.434.220,00	Kab Katingan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PAJUK DAERAH		Memajukan n pemerintahan yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan an daerah	Pemerintah Daerah	Kabai	76.104.600,00	BADAN KEJANGSANDAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang				151.359.913,00	Kab Katingan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PAJUK DAERAH		Memajukan n pemerintahan yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan an daerah	Pemerintah Daerah	25 Orang	166.695.904,00	BADAN KEJANGSANDAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RESTRATA TAHUN 2023	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET RESTRATA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PENCAPAIAN MAJU BENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5 02 01 2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Buletin Pelayanan Administrasi Pemerintahan	12 Bulan				3.434.034.750,00				Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	12 Bulan	3.794.892.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2 06 0001		Penyediaan Koneksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
5 02 01 2 06 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket				113.780.078,00	Kab. Katingan, Kecamatan, Semua Kel. Desa	PALAK DAERAH		Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	2 Paket	155.853.550,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Activa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSITRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEANGKA PENYAMAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PASU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PASU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket				1.207.938.027,00	Kab Katingan, Semua Kecamatan Semua KelDes	PALAK DAERAH		Memajukan n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pertumbuhan an daerah 6	Pemerintah Daerah	12 Paket	989.112.891,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.012.06.0003 Penyediaan Perawatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket				25.230.648,00	Kab Katingan, Semua Kecamatan Semua KelDes	PALAK DAERAH		Memajukan n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pertumbuhan an daerah 6	Pemerintah Daerah	12 Paket	60.387.928,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.012.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AMHIR PERODE REKSTRUK OPD	REALISASI CAPAIAN REKSTRUK TAHUN 2023	PRAKIBIDAN CAPAIAN TARGET REKSTRUK OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGKAKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIBIDAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PEMANGKAT DAERAH PEMANGKANG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket/Persebaran dan Pengembangan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	1.207.938.027.00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan Semua kelDes	PALAK DAERAH		Meningkatkan pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka pencapaian pertumbuhan an daerah 6	Pemerintah Daerah	12 Paket	989.112.897.00	BADAN KEJANGKANDAN ASET DAERAH
5.02.012.06.0003 Penyediaan Perawatan Rumah Tinggal																
			Jumlah Paket/Persebaran Rumah Tinggal yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	25.230.648.00	Kab. Katingan Semua Kecamatan Semua kelDes	PALAK DAERAH		Meningkatkan pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka pencapaian pertumbuhan an daerah 6	Pemerintah Daerah	12 Paket	60.367.928.00	BADAN KEJANGKANDAN ASET DAERAH
5.02.012.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	495.703.573,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kemampuan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	12 Paket	830.230.092,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2 06 0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	355.628.879,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kemampuan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	12 Paket	409.900.911,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2 06 0006		Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSISTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN MINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	116.921.562,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Memajukan pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	Pemerintah Daerah	12 Dokumen	128.613.718,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	1.109.812.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	Memajukan pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	Pemerintah Daerah	12 Laporan	1.220.793.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN TARGET OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENOMANAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGKUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah	2 Paket			2 Paket	3.079.935.778,00			-	Memujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	2 Paket	17.017.101.163,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	3.079.935.778,00	Kab. Katingan Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAJUAN PAD YANGLAH	-	Memujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	1 Unit	15.437.101.163,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERODE RESTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRATA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RESTRATA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit					Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELUARAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka pencapaian pembangunan dan daerah	Pemerintah Daerah	1 Unit	1.580.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi/Perencanaan	12 Bulan			12 Bulan	1.675.536.881,00				Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka pencapaian pembangunan dan daerah	Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.033.798.613,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															

Activate Windows

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang memperoleh pemeliharaan dan pengijinan	39 Unit			39 Unit	1.129.409.437,00			-	Menjuidkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	39 Unit	2.010.304.457,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	39 Unit			39 Unit	880.788.700,00	Kab. Katingan, Kecamatan, Semua kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Menjuidkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	39 Unit	1.123.162.934,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

Activate Windows

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTISTATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTISTATA TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENTISTATA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PEMANANGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperharakan/Direhabilitas	1 Unit				268.620.737,00	Kab. Kalingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	1 Unit	887.141.523,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan pengelolaan keuangan daerah	100 Persen				287.098.077.548,00						100 Persen	313.098.384.325,00		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100 Persentase			4 Dokumen	1.551.980.000,00				Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	100 Persentase	2.116.381.639,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.01.0001																	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PRAS																	

Activate Windows

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen				15.200.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPSAHKAN	-	Mewujudkan a. pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	48 Dokumen	28.119.995,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Kondisi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD																	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	2 Dokumen				312.795.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan a. pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	563.905.189,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Kondisi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD																	
5.02.02.2.01.0008																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTSTA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Perubahan APBD	2 Dokumen			2 Dokumen	297.300.000,00	Kab. Kalangan, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	HASIL PENGELUARAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	Meningkatkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	403.582.188,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran																
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	20 Dokumen			20 Dokumen	705.375.000,00	Kab. Kalangan, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	20 Dokumen	820.420.819,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0009																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Penyelidikan Perencanaan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai SAP dan Tepat Waktu	35 Laporan			35 Laporan	1.593.240.000,00			-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	35 Laporan	1.619.976.813,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Penyelidikan Kas Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyelidikan Kas Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	664.591.150,00	Kab. Karangasem Kecamatan Semana Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	1 Dokumen	609.452.077,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0003	Penyediaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAN TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.02.02.2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pembastaraan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP dan Tepat Waktu	39 Laporan		39 Laporan		1.290.801.635,00				Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	39 Laporan	1.735.302.291,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0002		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-L/O dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-L/O, dan Beban	12 Dokumen		12 Dokumen		112.594.411,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua kelDes	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	12 Dokumen	167.287.403,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0003		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														

Activate Windows

Activate Windows

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Perangungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan			12 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kalingan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Desa	HASIL PENCERLOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DISISIPKAN	Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih, profesional dan responsif dalam tanggap percepatan pembangunan daerah		Pemerintah Daerah	12 Laporan	500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KabupatenKida dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KabupatenKida	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KabupatenKida dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KabupatenKida	4 Dokumen		4 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Kalingan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	HASIL PENCERLOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DISISIPKAN	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	4 Dokumen	385.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah													

Activate Windows

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PEMANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akutansi, Penerimaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang			60 Orang	139.350.494,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGCELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6.	Pemerintah Daerah	100 Orang	181.180.784,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04		Peningkat Unsur Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Penelaahan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	12 Laporan			12 Laporan	282.422.317.648,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6.	Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	12 Laporan	307.318.207.582,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0007		Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kegiatan dan Alokasi Subsidi	12 Laporan			12 Laporan	12.450.742.320.00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Memajukan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka pencapaian pembangunan daerah	Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	12 Laporan	10.813.165.000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0008		Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan										Memajukan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka pencapaian pembangunan daerah				
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	12 Laporan				12 Laporan	242.311.575.328.00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA DESA	-	Memajukan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka pencapaian pembangunan daerah	Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	12 Laporan	259.005.042.592.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0009		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														

Activate Windows

Activate Windows

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENSJA OPD TAHUN 2023	PEAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Menesak	12 Laporan			12 Laporan	20.160.000.000,00	Kab. Kalingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL		Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	12 Laporan	30.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.001.0																
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan			12 Laporan	7.500.000.000,00	Kab. Kalingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)		Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	12 Laporan	7.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGATIAN / SUB KEGATIAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGATIAN / SUB KEGATIAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 02 02 2 05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	100 Persen ase			100 Persen	238.038.365,00				Mewujudkan pemerintahan yang bersih, pro- fessional dan responsif dalam tanggap percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah ase	100 Persen	307.515.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5 02 02 2 05		Pengadaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	100 Persen			100 Persen	238.038.385,00					Pemerintah Daerah	100 Persen	307.515.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
												Memajukan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah				
												Percepatan pelayanan Reformasi Birokrasi Menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel				

5 02 02 2 05 0002		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen				12 Dokumen	152.294.075,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memajukan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	12 Dokumen	175.104.181,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2 05 0003		Pembiayaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REKSTRAS OPD	REALISASI CAPAIAN REJUAL OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJUAL OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang				85.744.290,00	Kab. Kalingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	60 Orang	132.411.719,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan pengelolaan aset daerah	100 Person				1.518.080.000,00				Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	100 Person	1.317.638.276,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang tercatat dalam Neraca Daerah	59 Dokumen			59 Dokumen	1.518.080.000,00				Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	59 Dokumen	1.317.638.276,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.000.1	Penyusunan Standar Harga														

Go to Settings to activate Windows

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTSTA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	335.751.920.00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof esional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah 6 Percepatan pemerintah Reformasi Birokrasi menuju pe merintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	231.961.489.00	BIDAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	261.210.000.00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof esional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah 6 Percepatan pemerintah Reformasi Birokrasi menuju pe merintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	267.866.122.00	BIDAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJATA OPD	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJATA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJATA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Revisi/asi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Mak Daerah	12 Laporan			12 Laporan	124.224.789.00	Kab. Kalangan, Semua Kecamatan, Semua KalDesa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof esional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah 6 Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi menuju pe merintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	Pemerintah Daerah	12 Laporan	136.647.268.00	BAUJAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JUMLAH								307.590.435.000.00							360.711.274.747.00	


BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan yang dilengkapi dengan Anggaran dari Pemerintah Kabupaten Katingan (APBD). Pada bulan September 2024 ada penyesuaian sumber dana untuk penginputan RENJA Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik bila kita kuat dalam komitmen dan disiplin yang tinggi untuk menepati dan melaksanakan jadwal dan anggaran yang telah disediakan.

Kasongan, Oktober 2024
Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Katingan,


TOTO JAYA, S.P.
Pemina Tingkat I
NIP. 19720229 200604 1 008

LAMP IRAN

Matris Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2024 dan Perkiraan Maju 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN KEUANGAN						
5.02	KEUANGAN						
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/KOTA	Nilai Laki Rp		B	Rp 278,160,161,925 31,294,363,732	B	Rp 307,590,435,000 18,966,277,352
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi		8 Dokumen	Rp 327,670,682	8 Dokumen	Rp 359,081,476
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	Rp 81,430,249	2 Dokumen	Rp 89,516,999
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3 Dokumen	Rp 133,068,852	3 Dokumen	Rp 145,075,738
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Dokumen	Rp 113,171,581	3 Dokumen	Rp 124,488,739
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan		2 Dokumen	Rp 8,925,682,714	2 Dokumen	Rp 9,014,484,880
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		34 Orang	Rp 8,880,711,498	34 Orang	Rp 8,747,087,787
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	Rp 61,201,989	1 Laporan	Rp 63,325,944
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		1 Dokumen	Rp 183,769,226	1 Dokumen	Rp 204,071,149
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan kompetensinya		100%	Rp 206,785,921	100%	Rp 282,794,133
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	Rp 69,186,000	1 Paket	Rp 141,434,220
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		25 Orang	Rp 137,599,921	25 Orang	Rp 151,359,913

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Praktikan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 bulan	Rp 3,266,138,121	12 bulan	Rp 3,434,034,767	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		2 Paket	Rp 63,964,244	2 Paket	Rp 113,780,078	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	Rp 1,079,122,262	12 Paket	Rp 1,207,668,027	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan		12 Paket	Rp 30,889,631	12 Paket	Rp 29,230,648	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan		12 Paket	Rp 638,198,572	12 Paket	Rp 466,703,573	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	Rp 338,761,083	12 Paket	Rp 359,628,879	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan		12 Dokumen	Rp 106,292,329	12 Dokumen	Rp 116,921,582	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	Rp 1,008,920,000	12 Laporan	Rp 1,109,612,000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Barang Milik Daerah		2 Paket	Rp 15,470,826,655	2 Paket	Rp 3,080,935,778	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang disediakan		1 Unit	Rp 14,038,728,330	1 Unit	Rp 3,079,835,778	
5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	Rp 1,437,098,325	1 Unit	Rp 1,000,000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	Rp 1,479,009,300	12 Bulan	Rp 1,675,536,881	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		20 Laporan	Rp 26,405,500	20 Laporan	Rp 59,296,050	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan		12 Laporan	Rp 480,289,200	12 Laporan	Rp 583,438,961	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan		12 Laporan	Rp 194,271,760	12 Laporan	Rp 215,164,136	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		55 Laporan	Rp 779,042,840	55 Laporan	Rp 807,636,734	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD yang memperoleh pemeliharaan dan perbaikan		39 Unit	Rp 1,618,250,340	39 Unit	Rp 1,129,409,437	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya		39 Unit	Rp 516,995,527	39 Unit	Rp 860,786,700	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Praktikan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang DiperilairatDrehabilitasi		1 Paket	Rp 1.101.254.813	1 Paket	Rp 288.620.737	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	Rp 245.155.967.321	100%	Rp 287.086.077.848	
5.02.02.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu		100%	Rp 2.007.345.188	100%	Rp 1.551.880.000	
5.02.02.02.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Murni yang Disusun		2 Dokumen	Rp 149.484.513	2 Dokumen	Rp 122.360.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		2 Dokumen	Rp 98.741.542	2 Dokumen	Rp 98.220.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		48 Dokumen	Rp 23.239.615	48 Dokumen	Rp 15.200.000	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		2 Dokumen	Rp 466.008.441	2 Dokumen	Rp 312.795.000	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		2 Dokumen	Rp 306.538.999	2 Dokumen	Rp 287.930.000	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		20 Dokumen	Rp 963.332.078	20 Dokumen	Rp 705.375.000	
5.02.02.02.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terpenuhinya Laporan Keuangan yang sesuai SAP dan Tepat Waktu		100%	Rp 1.537.938.357	100%	Rp 1.583.240.000	
5.02.02.02.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		1 Dokumen	Rp 668.293.948	1 Dokumen	Rp 664.581.150	
5.02.02.02.02.03	Penyapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		1 Dokumen	Rp 193.459.489	1 Dokumen	Rp 212.805.438	
5.02.02.02.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		1 Dokumen	Rp 61.158.844	1 Dokumen	Rp 67.271.728	
5.02.02.02.02.07	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran KAS Daerah Laporan Aliran Kas dan Pemungutan /Penerimaan dan Penyelesaian perhitungan Pihak ketiga	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Penerimaan dan Penyelesaian Perhitungan Pihak ketiga		1 Laporan	Rp 376.727.564	1 Laporan	Rp 321.450.321	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
5.02.02.02.11	Perbaikan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Perbaikan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		100 Orang	Rp 238.298.512	100 Orang	Rp 317.128.363	
5.02.02.02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Presentase Laporan penatausahaan Keuangan Daerah Yang sesuai SAP dan Tepat Waktu		100%	Rp 1.433.672.048	100%	Rp 1.290.601.635	
5.02.02.02.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan LO dan Beban		12 Dokumen	Rp 154.782.978	12 Dokumen	Rp 112.564.411	
5.02.02.02.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran		12 Laporan	Rp 491.066.156	12 Laporan	Rp 500.000.000	
5.02.02.02.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengalangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengalangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		4 Dokumen	Rp 346.980.511	4 Dokumen	Rp 360.000.000	
5.02.02.02.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbandaran dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbandaran dan Tuntutan Kerugian Daerah		1 Dokumen	Rp 33.221.830	1 Dokumen	Rp 24.976.065	
5.02.02.02.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		1 Dokumen	Rp 257.892.404	1 Dokumen	Rp 163.711.645	
5.02.02.02.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		60 Orang	Rp 149.736.169	60 Orang	Rp 139.350.494	
5.02.02.02.04	Pengujiang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Penatausahaan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu		100%	Rp 238.857.383,524	100%	Rp 282.422.317,648	
5.02.02.02.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Akksi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Akksi Subsidi		12 Laporan	Rp 8.936.500.000	12 Laporan	Rp 12.450.742.320	
5.02.02.02.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyuluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyuluran Bantuan Keuangan		12 Laporan	Rp 218.690.190.800	12 Laporan	Rp 242.311.575.328	
5.02.02.02.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		12 Laporan	Rp 10.000.000.000	12 Laporan	Rp 20.160.000.000	
5.02.02.02.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		12 Laporan	Rp 2.220.692.724	12 Laporan	Rp 7.500.000.000	
5.02.02.02.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Laporan Penatausahaan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu		100%	Rp 319.628.204	100%	Rp 238.038.366	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024			Praktisan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.02.02.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah		12 Dokumen	Rp 144,714,199	12 Dokumen	Rp 152,294,075
5.02.02.05.03	Perbaikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Perbaikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		50 Orang	Rp 174,914,005	50 Orang	Rp 85,744,290
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Aset Daerah		100%	Rp 1,709,830,872	100%	Rp 1,518,080,000
5.02.03.02.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase Aset Yang Tercatat dalam Negera Daerah		100%	Rp 1,709,830,872	100%	Rp 1,518,080,000
5.02.03.02.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Daerah		2 Dokumen	Rp 548,943,710	2 Dokumen	Rp 335,751,920
5.02.03.02.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		2 Dokumen	Rp 221,401,720	2 Dokumen	Rp 281,210,000
5.02.03.02.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventrisasi (LHI) Barang Milik Daerah		12 Laporan	Rp 236,510,140	12 Laporan	Rp 238,161,154
5.02.03.02.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi / Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		2 Dokumen	Rp 590,043,876	2 Dokumen	Rp 558,732,137
5.02.03.02.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		12 Laporan	Rp 112,931,626	12 Laporan	Rp 124,224,789

JANUARY 2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	2 Dokumen	312.795.000,00	Kab. Kelampayan, Sema Kecamatan, Sema Kel/Tesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengusulkan pemenuhan yang bersifat profesional dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	565.901.565,00	BALAN EKUIKAS DAN AKT DOKUMEN
5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	2 Dokumen	297.930.000,00	Kab. Kelampayan, Sema Kecamatan, Sema Kel/Tesa	MAS PRINGGOLAN KECAMATAN DAKLAT PANGGOLAN	-	Mengusulkan pemenuhan yang bersifat profesional dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	403.381.186,00	BALAN EKUIKAS DAN AKT DOKUMEN
5	02	02	2.03	0009	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	20 Dokumen	705.375.000,00	Kab. Kelampayan, Sema Kecamatan, Sema Kel/Tesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengusulkan pemenuhan yang bersifat profesional dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	20 Dokumen	820.420.815,00	BALAN EKUIKAS DAN AKT DOKUMEN
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	35 Laporan	1.381.240.000,00	Kab. Kelampayan, Sema Kecamatan, Sema Kel/Tesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengusulkan pemenuhan yang bersifat profesional dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	35 Laporan	1.639.976.813,00	BALAN EKUIKAS DAN AKT DOKUMEN
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	666.135,00	Kab. Kelampayan, Sema Kecamatan, Sema Kel/Tesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mengusulkan pemenuhan yang bersifat profesional dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	1 Dokumen	669.451.077,00	BALAN EKUIKAS DAN AKT DOKUMEN
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	212.805.438,00	Kab. Kelampayan, Sema Kecamatan, Sema Kel/Tesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengusulkan pemenuhan yang bersifat profesional dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	1 Dokumen	234.085.982,00	BALAN EKUIKAS DAN AKT DOKUMEN
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	1 Laporan	321.450.321,00	Kab. Kelampayan, Sema Kecamatan, Sema Kel/Tesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengusulkan pemenuhan yang bersifat profesional dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	1 Laporan	333.595.351,00	BALAN EKUIKAS DAN AKT DOKUMEN
5	02	02	2.02	0010	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	74.002.201,00	Kab. Kelampayan, Sema Kecamatan, Sema Kel/Tesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengusulkan pemenuhan yang bersifat profesional dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	1 Dokumen	74.002.201,00	BALAN EKUIKAS DAN AKT DOKUMEN
5	02	02	2.02	0011	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	74.002.201,00	Kab. Kelampayan, Sema Kecamatan, Sema Kel/Tesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengusulkan pemenuhan yang bersifat profesional dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	1 Dokumen	74.002.201,00	BALAN EKUIKAS DAN AKT DOKUMEN

[illegible]

[illegible]

[illegible]